

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN ANGGARAN 2022

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4 ayat (1). Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 209);
- Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan,
 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten
 Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 499)
- 13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 620).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Kebijakan Akutansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA

- 4.1. Tugas Pokok dan Fungsi
- 4.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BAB VI PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Asumsi Ekonomi Makro pada periode anggaran pertama kali telah mengalami perubahan yang begitu signifikan yaitu dengan terjadinya kenaikan-kenaikan harga yang mempengaruhi situasi harga pasar sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan harga satuan yang berlaku, peraturan-peraturan pengelolahan keuangan yang mengalami perubahan juga turut mempengaruhi konsisi ekonomi

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang tergambar pada laporan realisasi keuangan dan neraca dinas berisi tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya di bandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggara Kecamatan Bulik.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dari program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

Dilihat dari capaian masing-masing indikator pada masing-masing kegiatan terlihat trend yang cukup baik. Hal ini menggambarkan terjadinya tingkat eksetabilitas yang tinggi pada masing-masing kegiatan, juga dapat digambarkan bahwa yang dicapai cukup berhasil dalam melaksanakannya. Ini berarti pelaksanaan program dan kegiatan mampu dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan yaitu tepat sasaran.

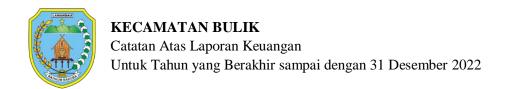
BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau melalui APBD Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar **Rp. 5.622.415.331,00** dengan rincian untuk belanja Operasioanal sebesar **Rp. 4.628.615.331,00** dan belanja Modal sebesar **Rp. 993.800.000,00**

Alokasi anggaran belanja Operasioanal sebesar **Rp. 4.628.615.331,00** terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sedangkan alokasi anggaran belanja Modal sebesar **Rp. 993.800.000,00** tersebut dapat dirinci untuk belanja pegawai **Rp. 3.294.715.318,00** belanja barang dan jasa **Rp. 1.333.900.013,00** dan belanja modal sebesar **Rp. 993.800.000,00** Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Kantor Kecamatan Bulik dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*)



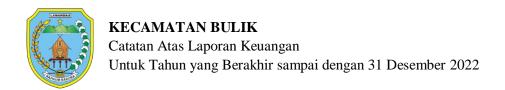
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau pada tahun anggaran 2021 melalui APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 5.622.415.331,00** yang terdiri dari belanja Operasional sebesar **Rp. 4.628.615.331,00** dan belanja Modal sebesar **Rp. 993.800.000,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 5.567.156.647,00** atau sebesar 99,02 %. Sedangkan Target yang seharusnya dicapai s/d Desember Tahun Anggaran 2022 adalah 100%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✓ Perubahan Kebijakan Akuntansi yang semula berbasis Kas menjadi berbasis Akrual, menjadikan pegawai yang menangani masalah pengelolaan keuangan harus belajar dari awal untuk menyesuaikan dengan Sisdur Pengelolaan Keuangan yang baru.
- ✓ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- ✓ Inefisiensi Pegawai pelaksana dan masih terbatasnya pejabat teknis yang menanganinya;
- ✓ Terbatasnya dana, daya, dan kualitas Sumber Daya Manusia.



3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

- ✓ Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target.
- ✓ Aparatur yang menangani masalah pengelolaan keuangan harus terus belajar dan didiklatkan untuk memiliki integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Sisdur Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual..
- ✓ Perlunya peningkatan kualitas dan efisiensi aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- ✓ Perlunya regulasi, konsolidasi dan revitalisasi SKPD Kantor Kecamatan Bulik khususnya dalam dana, daya, dan kualitas Sumber Daya Manusia.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akutansi yang digunakan dalam pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2021

4.1 Entitas Akutansi / Entitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022

Entitas pelaporan Keuangan daerah mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai entitas akutansi, Kecamatan Bulik wajib menyelenggarakan akutansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akutansi menginduk pada kebijakan akutansi dari entitas pelaporan Keuangan daerah yang Pemerintah Kabupaten Lamandau.

4.2 Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akutansi yang digunakan dalam Menyusun laporan Keuangan Kecamatan Bulik adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Kas akrual untuk pengakuan aktiva, hutang dan akuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Kecamatan Bulik dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Kecamatan Bulik selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada setiap periode diakui sebagai Sisa Lebih / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aktiva, hutang dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 Kebijakan Akutansi

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Kecamatan Bulik yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Kecamatan Bulik. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kecamatan Bulik.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kecamatan Bulik yang mengurangi Ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya.

Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Kecamatan Bulik. Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melaui bendahara pengeluaran. Pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Akutansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Pembiayaan

Pembiayaan Kecamatan Bulik adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima kambali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam

penganggaran pemerintah di Kecamatan Bulik terutama dimaksudkan untuk penutup deficit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akutansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang alokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih berada dalam pengelolahan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2021.

Kas sinyatakan dalam rupiah, jika kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal Neraca

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum untuk dapat diakui sebagai asset tetap suatu asset harus berwujud dan memenuhi kriterian sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Ekuitas dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam jangka pendek.

Penilaian;

- a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan Akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
- b. Perkiraan cadangan piutang disajika sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
- c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasarkan harga beli terakhir atau harga standar.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan

Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 21.500.000,00 12.660.000,00 16.897.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 12.660.000,00 dan Rp 16.897.000,00dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.500.000,00	12.660.000,00	16.897.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.500.000,00	12.660.000,00	16.897.000,00

5.1.1.1 **Pendapatan Asli Daerah**

	isasi 2022 Re	alisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah 21.500.000,00 12.6	60.000,00 16	5.897.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 12.660.000,00 dan Rp 16.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Daerah	21.500.000,00	12.660.000,00	16.897.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.500.000,00	12.660.000,00	16.897.000,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

 Pendapatan
 Anggaran
 Realisasi 2022
 Realisasi 2021

 Retribusi
 21.500.000,00
 12.660.000,00
 16.897.000,00

Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 12.660.000,00 dan Rp 16.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Penyewaan Tanah dan	4.000.000,00	6.000.000,00	4.475.000,00
Bangunan			
Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	6.660.000,00	3.490.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan	17.500.000,00	0.00	8.932.000,00
Bangunan	2,100000,00	5,00	
Jumlah	21.500.000,00	12.660.000,00	16.897.000,00

5.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang sah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Lain-lain PAD	0,00	0.00	0,00
yang sah	0,00	0,00	0,00

5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja	5.622.415.331,00	5.567.156.647,00	4.448.533.835,00

Realisasi Belanja Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 5.567.156.647,00 dan 4.448.533.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Operasi	4.628.615.331,00	4.575.899.847,00	4.310.881.535,00
Belanja Modal	993.800.000,00	991.256.800,00	137.652.300,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.622.415.331,00	5.567.156.647,00	4.448.533.835,00



5.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 4.628.615.331,00 4.575.899.847,00 4.310.881.535,00

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.575.899.847,00 dan Rp 4.310.881.535,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	3.294.715.318,00	3.281.146.147,00	3.097.904.743,00
Belanja Jasa	1.333.900.013,00	1.294.753.700,00	1.190.976.792,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	22.000.000,00
Jumlah	4.628.615.331,00	4.575.899.847,00	4.310.881.535,00

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 Belanja Pegawai 3.294.715.318,00 3.281.146.147,00 3.097.904.743,00

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 3.281.146.147,00 dan Rp 3.097.904.743,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	1.546.625.332,00	1.545.499.060,00	1.503.309.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.838.319,00	150.232.424,00	141.953.252,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103.165.000,00	102.385.000,00	109.940.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.434.125,00	60.115.000,00	54.250.000,00
Belanja Tunjangan Beras	109.846.656,00	108.919.680,00	105.443.520,00

PNS			
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	44.660.650,00	39.652.693,00	23.999.792,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.567,00	26.599,00	27.033,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.268.806.669,00	1.266.155.691,00	1.150.821.546,00
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa – Pemakaian Kekayaan Daerah	1.075.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan tertentu-izin	1.075.000,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00
Jumlah	3.294.715.318,00	3.281.146.147,00	3.097.904.743,00

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 Belanja Barang dan Jasa 1.333.900.013,00 1.294.753.700,00 1.190.976.792,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1.294.753.700,00 dan Rp 1.190.976.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	54.444.923,00	53.532.000,00	42.396.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	13.989.179,00	13.953.093,00	5.937.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	4.475.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.000.000,00	1.990.000,00	0,00

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.873.902,00	2.304.000,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.218.625,00	22.170.000,00	16.450.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.102.978,00	76.813.000,00	44.010.620,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.857.626,00	9.837.200,00	17.656.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.412.155,00	14.412.100,00	14.412.155,00
Belanja Tagihan Air	8.840.000,00	8.537.200,00	4.522.500,00
Belanja Listrik	25.276.989,00	25.276.989,00	32.182.848,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.763.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27.000.000,00	26.700.000,00	25.206.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.017.070,00	845.000,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.300.000,00	8.198.200,00	5.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	5.600.000,00	5.570.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.200.000,00	4.100.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.050.000,00	61.550.000,00	51.240.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.150.000,00	19.985.000,00	13.852.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	56.525.000,00	52.775.000,00	46.455.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	4.000.000,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.975.000,00	4.875.000,00	39.332.500,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	17.775.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	21.100.000,00	21.086.400,00	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.738.000,00	13.851.400,00	21.516.300,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	206.600.000,00	204.424.000,00	128.583.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.783.000,00	32.726.243,00	21.402.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.825.000,00	49.690.000,00	103.170.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.710.000,00	35.638.500,00	169.460.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	847.560,00	847.560,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	734.550,00	734.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	8.395.000,00	7.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	7.995.000,00	7.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	6.880.000,00	6.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	237.252.000,00	236.147.650,00	25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.932.000,00	88.335.312,00	90.003.459,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.064.000,00	56.421.692,00	61.653.515,00

Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.920.000,00	22.920.000,00	22.920.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	20.688.000,00	20.688.000,00	20.688.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	13.789.440,00	13.276.515,00	13.522.248,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.067.064,00	1.022.646,00	889.247,00
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	2.182.950,00	1.500.000,00	3.050.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	7.200.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.100.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	13.520.000,00
Jumlah	1.333.900.013,00	1.294.753.700,00	1.190.976.792,00

5.1.1.1.3 Belanja Bantuan Sosial

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	22.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 22.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	22.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	22.000.000,00

5.1.1.2 Belanja Modal

Anggaran Realisasi 2022 Realisasi 2021 **Belanja Modal** 993.800.000,00 991.256.800,00 137.652.300,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Kecamatan Bulik Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.000.000,00	128.529.500,00	87.652.300,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.800.000,00	649.052.300,00	50.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	214.000.000,00	213.675.000,00	0,00
Jumlah	993.800.000,00	991.256.800,00	137.652.300,00

5.1.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Belanja Modal
 Anggaran
 Realisasi 2022
 Realisasi 2021

 Peralatan dan Mesin
 129.000.000,00
 128.529.500,00
 87.652.300,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 128.529.500,00 dan Rp 87.652.300,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	11.382.800,00
Belanja Modal Alat Pendingin	64.000.000,00	63.629.500,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	29.980.500,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00	9.900.000,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	36.811.500,00
Belanja Modal Personal Computer	35.000.000,00	35.000.000,00	9.477.500,00
Jumlah	129.000.000,00	128.529.500,00	87.652.300,00

5.1.1.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Gedung dan Bangunan	650.800.000,00	649.052.300,00	50.000.000,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 649.052.300,00 dan Rp 50.000.000,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	475.000.000,00	473.952.300,00	50.000.000,00
Belanja Modal Taman	60.000.000,00	59.800.000,00	
Belanja Modal Pagar	115.800.000,00	115.300.000,00	
Jumlah	650.800.000,00	649.052.300,00	50.000.000,00

5.1.1.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Jalan, Irigasi	214.000.000,00	213.675.000,00	0,00
dan Jaringan	=1,	212.072.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 213.675.000,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Jalan lainnya	214.000.000,00	213.675.000,00	0,00
Jumlah	214.000.000,00	213.675.000,00	0,00

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pembiayaan	(5.600.915.331,00)	(5.554.496.647,00)	(4.431.636.835,00)
Anggaran			
(SiLPA)			

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Kecamatan Bulik Tahun 2022 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp 5.298.471.373,04 Kewajiban sebesar Rp 102.764.580,00 dan Ekuitas sebesar Rp 5.195.706.793,04.

5.2.1 Aset

Aset 31 Desember 2022 31 Desember 2021 5.298.471.373,04 4.431.334.441,04

Total saldo Aset Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.298.471.373,04 atau naik sebesar Rp 867.136.932,00 dari tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	2.641.134,00	0,00	0,00	2.641.134,00
Aset Tetap	5.295.830.239,04	4.431.334.441,04	19,51	864.495.798,00
Jumlah	5.295.830.239,04	4.431.334.441,04	19,51	867.136.932,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar 2.641.134,00 31 Desember 2021 2.640.00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Kecamatan Bulik per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.641.134,00.

Uraian	31 Desember 2022	Naik/ (turun) 31 Desember 2021		Naik/ (turun)
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	2.641.134,00	0,00	100,00	2.641.134,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1 Persediaan

Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 0,00 0,00

Saldo Persediaan Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00, mengalami peningkatan sebesar 0,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Kecamatan Bulik Laporan Persediaan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2021		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2022	362.627.793,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Penerimaan Reklas Barang Ekstrakompentable dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	368.627.79300	
10	Dikurangi:		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2022	(0,00)	
12	Pengeluaran hibah persediaan	(0,00)	

13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	(0,00)	
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+9+13)		368.627.793,00
15	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(368.627.793,00)
16	Persediaan tahun 2021 (14+15)		0,00

5.2.1.1 Aset Tetap

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Aset Tetap

5.295.830.239,04 4.431.334.441,04

Saldo Aset Tetap Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.295.830.239,04 mengalami kenaikan sebesar Rp 864.495.798,04 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember	31 Desember	N	aik/ (turun)
Craian	2022	2021		
		_	%	(Rp)
Tanah	679.515.000,00	679.515.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.920.498.849,00	2.797.969.349,00	4,38	122.529.500,00
Gedung dan Bangunan	7.532.137.156,04	6.229.216.003,04	20.92	1.302.921.153,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	472.672.139,00	258.997.139,00	82,50	213.675.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan	(6.308.992.905,00)	(5.534.363.050,00)	0,00	(774.629.885,00)
Jumlah	5.295.830.239,04	4.431.334.441,04	22,37	864.495.798,04

Saldo Awal 1 Januari 2021

4.431.334.441,04

Penambahan:

 Belanja Modal 2022 (Rincian 991.256.800,00 terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal)

• Mutasi Rumah Dinas Staf dari SATPOLDAM	280.000.000,00	
 Mutasi Garasi Damkar dari SATPOLDAM 	194.120.000,00	
 Reklas dari KIB C Kelurahan Nanga Bulik Ke Kecamatan Bulik 	249.348.853,00	
 Akumulasi Penyusustan Berkurang Karena Reklas dari Intra ke Ekstra 	(5.533.332,00)	
Jumlah Penambahan	1.720.258.985,00	
Pengurangan:		
 Reklas dari Intra ke Ekstra (Koreksi BPK 2021) Kecamatan Bulik 	6.000.000,00	
 Reklas ke Barang dan Jasa BMD Kecamatan Bulik 	69.600.000,00	
Beban Punyusustan	464.597.687,00	
 Akumulasi Penyusutan Mutasi Rumah Dinas Staf dan Garasi Damkar dari SATPOLDAM 	315.565.500,00	
Jumalah Pengurangan	<u>855.763.187,00</u>	
Jumlah (1+2-3)	5.295.830.239,04	
5.2.1.2.1 Tanah		
Tanah	31 Desember 2022 31 Desember 2021	
	679.515.000,00 679.515.000,00	
Saldo Aset Tanah Kecamatan Bulik pe 679.515.000,00.	er 31 Desember 2022 adalah sebesar R _I	р
5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 31 Desember 2021	
	51 Described 2022 51 Described 2021	

2.920.498.849,00

Peralatan dan Mesin

2.797.969.349,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.920.498.849,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 122.529.500,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2020	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2021		Saldo per 31/12/2021	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	2.797.696.349,00	6.000.000,00	128.529.500,00	2.920.498.849,00	122.529.500,00
Jumlah	2.797.696.349,00	6.000.000,00	128.529.500,00	2.920.498.849,00	122.529.500,00

Penambahan sebesar, Rp 128.529.500,00 pengurangan sebesar (Rp 6.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

2.797.969.349,00

Penambahan:

Belanja Modal Tahun
 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin)

Jumlah Penambahan 128.529.500,00

Pengurangan:

• Reklas dari Intra ke Ekstra (Koreksi BPK 2021) 6.000.000,00

Kecamatan Bulik

Jumalah Pengurangan <u>6.000.000,00</u>

Jumlah (1+2-3) 2.920.498.849,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022 31 Desember 2020

Gedung dan Bangunan 7.532.137.156,04 6.229.216.003,04

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 7.532.137.156,04 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.302.921.153,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2021		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	6.229.216.003,04	69.600.000,00	1.302.921.153,00	7.532.137.156,04	1.302.921.153,00
Jumlah	6.229.216.003,04	69.600.000,00	1.302.921.153,00	7.532.137.156,04	1.302.921.153,00

Penambahan sebesar Rp 1.372.521.153,00 dan pengurangan sebesar (Rp 69.600.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan 6.229.216.003,04

Penambahan:

Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian 649.052.300,00 terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan)

• Mutasi Rumah Dinas Staf dari 280.000.000,00 SATPOLDAM

• Mutasi Garasi DAMKAR dari 194.120.000,00 SATPOLDAM

Reklas dari KIB C Kel. Nanga Bulik ke
 Kecamatan Bulik

Jumlah Penambahan 1.372.521.153,00

Pengurangan:

• Reklas ke Barang dan Jasa BMD Kecamatan 69.600.000,00

Bulik

Jumalah Pengurangan <u>69.600.000,00</u>

Jumlah (1+2-3) 7.532.137.156,04

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022 31 Desember 2020

Jalan, Irigasi dan Jaringan 472.672.139,00 258.997.139,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 472.672.139,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 213.675.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2021		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.997.139,00	0,00	213.675.000,00	472.672.139,00	213.675.000,00
Jumlah	258.997.139,00	0,00	213.675.000,00	472.672.139,00	213.675.000,00

Penambahan sebesar Rp 213.675.000,00 dan pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan

258.997.139,00

Penambahan:

 Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan) 213.675.000,00

Jumlah Penambahan

213.675.000,00

Pengurangan:

• - (0,00)

Jumalah Pengurangan (0,00)

Jumlah (1+2-3) 472.672.139,00

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 0,00, dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022 31 Desember 2021 0,00 0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

28

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan (6.308.992.905,00) (5.534.363.050,00)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Kecamatan Bulik per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp 6.308.992.905,00) mengalami peningkatan sebesar (Rp 774.629.855,00) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021		an Selama Tahun 021	Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)	
	31/12/2021	Pengurangan	Penambahan	31,12,2022		
Akumulasi Penyusutan	(5.534.363.050,00)	(5.533.332,00)	(780.163.187,00)	(6.308.992.905,00)	(774.629.855,00)	
Jumlah	(5.534.363.050,00)	(5.533.332,00)	(780.163.187,00)	(6.308.992.905,00)	(774.629.855,00)	

Penambahan sebesar (Rp 780.163.187,00) dan pengurangan sebesar (Rp 5.533.332,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan (5.534.363.050,00)

Penambahan:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (87.036.381,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (359.273.500,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi (18.287.806,00)
Mutasi (315.565.500,00)

Jumlah Penambahan (780.163.187,00)

Pengurangan:

Penghapusan (0,00)
 Koreksi Salah Saji (5.533.332,00)

Jumlah Pengurangan 310.032.168,00

Jumlah (1+2-3) (6.308.992.905,00)



5.2.1.2 Aset Lainnya

Aset Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020 0,00 0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00, terdiri atas Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp 0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	Uraian 31 Desember 2022 31 Desember 2021		Naik/ (turun)	
		31 Desember 2021	%	(Rp)
Aset Lain-lain	0,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(6.780.000,00)	0,00	(6.780.000,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain 31 Desember 2022 31 Desember 2021 6.780.000,00 6.780.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat. Saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp 0,00

Uraian	31 Desember	31 Desember	Naik/ (turun)	
	2022	2021	%	(Rp)
Aset Lain-lain	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00
Jumlah	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022
Aset Rusak Berat/Usang	6.780.000,00	6.780.000,00
Jumlah	6.780.000,00	6.780.000,00



5.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(0,00)

(6.780.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp (0,00) dan 31 Desember 2021 sebesar Rp (6.780.000,00)

Uraian	31 Desember 2022 31 De	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(0,00)	(6.780.000,00)	0,00	(6.780.000,00)
Jumlah	(0,00)	(6.780.000,00)	0,00	(6.780.000,00)

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban

31 Desember 2022

31 Desember 2021

102.764.580,00

97.528.855,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 102.764.580,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.235.725,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
2022	2022		%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022

31 Desember 2021

102.764.580,00

97.528.855,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 102.764.580,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.235.855,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember	31 Desember	Naik/ (turun)	
	2022	2021	%	(Rp)
Utang Belanja	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00
Jumlah	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00

5.3.2.1.1 Utang Belanja

Utang Beban

31 Desember 2022 31 Desember 2021 102.764.580,00 97.528.855,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 102.764.580,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.235.855,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Belanja	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00
Jumlah	102.764.580,00	97.528.855,00	5,37	5.235.855,00

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2021	102.764.580,00	97.528.855,00
Jumlah	102.764.580,00	97.528.855,00

Rincian Utang Beban Barang Jasa sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Hutang Tagihan Rekening Air PDAM Ub. Desember 2021	367.300,00	289.200,00
Jumlah	367.300,00	289.200,00

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas

31 Desember 2022 31 Desember 2021

5.195.706.793,04

4.333.805.586,04

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.195.706.793,04 mengalami kenaikan sebesar Rp 861.901.207,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022 31 Desember 2022		N	aik/ (turun)	
		%	(Rp)		
Ekuitas	5.195.706.793,04	4.333.805.586,04	19,89	861.901.207,00	
Jumlah	5.195.706.793,04	4.333.805.586,04	19,89	861.901.207,00	

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban dan Ekuitas

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.298.471.373.04

4.431.334.441,04

Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.298.471.373,04 mengalami kenaikan sebesar Rp 867.136.932,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022 31 Desember 2021	Naik/ (turun)		
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	5.298.471.373,04	4.431.334.441,04	19.89	876.901.207,00
Jumlah	5.298.471.373,04	4.431.334.441,04	19.57	867.136.932,00

5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Bulik dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022	2021	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12.660.000,00	16.897.000,00	(4.237.000,00)	(25,08)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.660.000,00	16.897.000,00	(4.237.000,00)	(25,08)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	2022	2021 Kenaikan /(Penurunan)		%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 12.660.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.660.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00
Jumlah	12.660.000,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SOPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 12.660.000,00, dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 16.897.000,00.

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Kecamatan Bulik, dengan realisasi dalam tahun 2022 sebesar Rp 5.115.441.211,00 tahun 2021 sebesar Rp 4.769.315.933,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	3.283.061.858,00	3.106.066.240,00
Beban Persediaan	368.627.793,00	358.242.275,00
Beban Jasa	332.224.520,00	299.077.992,00
Beban Pemeliharaan	366.237.710,00	260.910.000,00
Beban Perjalanan Dinas	300.691.643,00	274.672.100,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	22.000.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.036.381,00	111.220.587,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	359.273.500,00	320.814.349,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	18.287.806,00	16.312.390,00
Jumlah	5.115.441.211,00	4.769.315.933,00

5.3.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2022. Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 5.115.441.211,00 dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 4.769.315.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	3.283.061.858,00	3.106.066.240,00
Beban Persediaan	368.627.793,00	358.242.275,00
Beban Jasa	332.224.520,00	299.077.992,00
Beban Pemeliharaan	366.237.710,00	260.910.000,00
Beban Perjalanan Dinas	300.691.643,00	274.672.100,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	22.000.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.036.381,00	111.220.587,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	359.273.500,00	320.814.349,00

Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	18.287.806,00	16.312.390,00
Jumlah	5.115.441.211,00	4.769.315.933,00

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 3.283.061.858.00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 176.995.618.00 atau 5,70% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp 3.106.066.240.00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.

Rincian Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.545.499.060,00	1.503.309.600,00	42.189.460,00	2,81
Beban Tunjangan Keluarga PNS	150.232.424,00	141.953.252,00	8.279.172,00	5,83
Beban Tunjangan Jabatan PNS	102.385.000,00	109.940.000,00	(7.555.000,00)	(6,87)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.115.000,00	54.250.000,00	5.865.000,00	10,81
Beban Tunjangan Beras PNS	108.919.680,00	105.443.520,00	3.476.160,00	3,30
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan				
Khusus PNS	39.652.693,00	23.999.792,00	15.652.901,00	65,22
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.599,00	27.033,00	(434,00)	(1,61)
Beban Tambahan Penghasilan				
berdasarkan Beban Kerja PNS	1.268.071.402,00	1.158.983.043,00	109.088.359,00	9,41
Beban Honorarium Pengadaan				
Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00
Jumlah	3.283.061.858,00	3.106.066.240,00	176.995.618,00	5,70

5.3.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 368.627.793,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 10.385.518,00 atau 2,90% bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2021 sebesar Rp 358.242.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.170.000,00	16.450.000,00	5.720.000,00	34,77
Beban Bahan-Bahan Lainnya	14.412.100,00	14.412.155,00	(55,00)	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	845.000,00	0,00	845.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.532.000,00	42.396.500,00	11.135.500,00	26,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.813.000,00	44.010.620,00	32.802.380,00	74,53
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,00	4.475.000,00	525.000,00	11,73
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.953.093,00	5.937.500,00	8.015.593,00	135,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.837.200,00	17.656.000,00	(7.818.800,00)	(44,28)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	61.550.000,00	51.240.000,00	10.310.000,00	20,12
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.985.000,00	13.852.000,00	6.133.000,00	44,28
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.775.000,00	46.455.000,00	6.320.000,00	13,60
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	17.775.000,00	(17.775.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Batik Tradisional	4.875.000,00	39.332.500,00	(34.457.500,00)	(87,61)
Beban Pakaian Olahraga	21.086.400,00	0,00	21.086.400,00	0,00

Prestasi Jumlah	0,00 368.627.793,00	7.200.000,00 358.242.275,00	(7.200.000,00) 10.385.518,00	(100,00) 2,90
Beban Penghargaan atas Suatu	0.00	7 200 000 00	(7.200.000.00)	(100.00)
Perlombaan	1.300.000,00	3.030.000,00	(1.550.000,00)	(30,82)
Beban Hadiah yang Bersifat	1.500.000,00	3.050.000,00	(1.550.000,00)	(50,82)
Ekstrakomptabel	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00	0,00
Beban Persediaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00

Beban Persediaan Ektrakomptabel TA.2022	Jumlah	Harga	Total
Net Bola Volly	2 Buah	200.000,00	400.000,00
Bola Volly	6 Buah	400.000,00	2.400.000,00
Papan Skor	2 Buah	400.000,00	800.000,00
Net Bola Volly	2 Buah	200.000,00	400.000,00
Bola Volly	3 Buah	400.000,00	1.200.000,00
Papan Skor	2 Buah	400.000,00	800.000,00
Jumlah			6.000.000,00

5.3.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainya, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 332.224.520,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 33.146.528,00 atau 11,08% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2021 sebesar Rp 299.077.992,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00	28,57
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	13.520.000,00	(13.520.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga	88.335.312,00	90.003.459,00	(1.668.147,00)	(1,85)

Jumlah	332.224.520,00	299.077.992,00	33.146.528,00	11,08
Beban Bimbingan Teknis	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00
Konstruksi Bangunan Gedung	4.100.000,00			
Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan		0,00	4.100.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi				
Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi				
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.022.646,00	889.247,00	133.399,00	15,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.276.515,00	13.522.248,00	(245.733,00)	(1,82
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.557.066,00	4.890.975,00	666.091,00	13,62
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	26.700.000,00	25.206.000,00	1.494.000,00	5,93
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.450.000,00	7.740.000,00	(290.000,00)	(3,75
Beban Tagihan Listrik	25.276.989,00	32.182.848,00	(6.905.859,00)	(21,46
Beban Tagihan Air	8.606.300,00	4.461.700,00	4.144.600,00	92,89
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	20.688.000,00	20.688.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	0,0
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	56.421.692,00	61.653.515,00	(5.231.823,00)	(8,49
Administrasi				

5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 296.637.710,00 dan kenaikan sebesar Rp 35.727.710,00 atau 13,69% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp 260.910.000,00.

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

OPD	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.638.500,00	169.460.000,00	(133.821.500,00)	(78,97)
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu	847.560,00	0,00	847.560,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan- Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	734.000,00	0,00	734.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.395.000,00	7.250.000,00	1.145.000,00	15,79
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	7.995.000,00	7.300.000,00	695.000,00	9,52
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.880.000,00	6.900.000,00	(20.000,00)	(0,29)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	236.147.650,00	25.000.000,00	211.147.650,00	844,59
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	366.237.710,00	260.910.000,00	105.327.710,00	40,37

5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 20212 dengan realisasi sebesar Rp300.691.643,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 26.019.543,00 atau 9,47% bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2021 sebesar Rp 274.672.100,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.851.400,00	21.516.300,00	(7.664.900,00)	(35,62)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	204.424.000,00	128.583.000,00	75.841.000,00	58,98
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.690.000,00	103.170.000,00	(53.480.000,00)	(51,84)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.726.243,00	21.402.800,00	11.323.443,00	52,91
Jumlah	300.691.643,00	274.672.100,00	26.019.543,00	9,47

5.3.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 100,00%.

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Beban bantuan sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan

sebesar Rp 22.000.000,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan beban bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp 22.000.000,00 terdiri dari:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penuruna n	%
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)

5.3.2.8 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, asset tetap tahun 2022 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp 464.597.687,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 16.250.361,00 atau 3,62% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp 448.347.326,00. Beban Penyusutan sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.036.381,00	111.220.587,00	(24.184.206,00)	(21,74)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	359.273.500,00	320.814.349,00	38.459.151,00	11,99
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	18.287.806,00	16.312.390,00	1.975.416,00	12,11
Jumlah	464.597.687,00	448.347.326,00	16.250.361,00	3,62

5.3.3 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	12.660.000,00	16.897.000,00	(4.237.000,00)	(25.08)
Beban	(5.115.441.211,00)	(4.769.315.933,00)	346.125.273,00	7,26
Surplus/Defisit LO	(5.102.781.211,00)	(4.752.418.933,00)	(350.362.278,00)	7,37

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2022	2021	
	(Rp)	(Rp)	
EKUITAS AWAL	4.333.805.586,04	4.546.990.811,04	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.102.781.211,00)	(4.752.418.933,00)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.533.332,00	0,00	
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	
Koreksi Utang Beban	(3.250.914,00)	0,00	
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00	

EKUITAS AKHIR	5.195.706.793,04	4.333.805.586,04	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.962.400.000,00	4.500.349.906,00	
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	48.513.464,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	(9.789.271,0)0	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	159.609,00	
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00	
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00	
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00	

Penjelasan:

- 1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2021 senilai Rp 4.333.805.586,04;
- Surplus/Defisit LO senilai (Rp 5.102.781.211,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2022;
- 3. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar sebesar (Rp 2.282.418,00) dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan rincian:
 - a. Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp 5.533.332,00 dikarenakan akumulasi penyusutan berkurang karena reklas dari intra ke ekstra (Koreksi BPK Audit TA. 2022
 - b. Koreksi Utang Beban senilai (Rp 3.250.914,00) dikarenakan adanya koreksi utang TPP Ub. Desember 2021

- 4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 5.962.400.000,00
- 5. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 5.195.706.793,04 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2022.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D) adalah sebagai berikut:

6.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Kecamatan Bulik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kantor Kecamatan Bulik mempunyai fungsi :

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan umum di wilayah kerja Kecamatan;
- 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat;
- 4. Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kerja Kecamatan;
- 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- 6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan.



c. Wewenang

Untuk melaksanakan fungsinya, Kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- 4. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- 7. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 9. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- 11. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 12. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

- 14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- 15. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- 16. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati;
- 17. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 18. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 19. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 20. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 21. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

6.2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

4.2.1. Camat

Mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan jalannya kegiatan Pemerintahan diwilayah Kecamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggrakan fungsi:

- 1. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- 4. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;



7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Camat membawahi:

- 1. Sekretariat;
- 2. Seksi Pemerintahan;
- 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 8. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

6.2.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas masing-masing seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Kantor Kecamatan Bulik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan;
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan keuangan;
- d. Melaksanakan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan ketatausahaan; dan



- f. Melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan.
- (2) Sub bagian sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana anggaran rutin;
- 2. Melaksanakan Penyusunan administrasi keuangan dan Laporan Keuangan;
- 3. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan bendahara gaji.
- 4. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan untuk keperluan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat;
- 2. Menyelenggarakan urusan perlengkapan/inventaris barang dan urusan rumah tangga;
- 3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;

- 4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5. Menyusun Daftar urutan kepegawaian;
- 6. Pelaksanaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- 7. Pelaksanaan organisasi, tatalaksana, formasi jabatan dan analisis jabatan;
- 8. Penghimpunan bahan peraturan perundang-undangan; dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

6.2.3. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam urusan Pemerintahan Umum serta melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi motivasi pembangunan Desa/Kelurahan dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 2. Memfasilitasi Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3. Memberikan Rekomendasi dan Perijinan tertentu yang mencakup tugas Seksi Pemerintahan;
- 4. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
- 5. Memfasilitasi Penyelenggaraan kerja sama antar desa dan Penyelesaian perselesihan antar desa;
- 6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Kecamatan;
- 7. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;
- 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.



6.2.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 2. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- 3. Melaksanakan Pengaturan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) diwilayah Kecamatan;
- 4. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 5. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan terhadap Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Kecamatan;
- 6. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

6.2.5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- Melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- 2. Melaksanakan Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- 3. Melaksanakan Kegiatan Pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4. Melaksanakan Kegiatan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di tingkat Kecamatan;
- 5. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan, dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

- 6. Melakukan Pembinaan serta pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS);
- 7. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Program Beras Miskin (Raskin) di tingkat Kecamatan;
- 8. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- 9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.

6.2.6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- 2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 4. Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing;
- 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- 6. Penanggulangan masalah sosial.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 8. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- 9. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.



6.2.7. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyiapkan, dan melaksanakan serta membuat laporan dalam urusan Pelayanan Umum di wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat/ masyarakat;
- 2. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mencakup bidang tugasnya

KECAMATAN BULIK
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Bulik Kabupaten

Lamandau disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan

Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan

Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat

meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna

laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami

dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

ini masih jauh dari sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil

bekerja (learning by doing) dari seluruh jajaran Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten

Lamandau dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Kantor

Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang telah mendukung tersusunnya Laporan

Keuangan ini.

Nanga Bulik,

Juni 2023

Camat Bulik,

MUL'ATMIDY, S.Sos, M.A.P

Pembina (IV/b)

NIP. 19790402 200502 1 004

56